



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

JURNAL *K*ehumasan

**DINAMIKA PENGELOLAAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2022**



Setneg Mantul Road to G20
"Digital Workshop with Meta:
Social Media Campaign for G20"

Grid of video call windows showing participants from G20 Indonesia 2022 and Meta.

Webinar Kehumasan:
Pemindahan Ibu Kota Negara

Grid of video call windows showing participants from the webinar.



Setneg Mantul Road to G20
"Digital Workshop with Meta:
Social Media Campaign for G20"

Logos for G20 Indonesia 2022 and Meta.



📷 : Kementerian Sekretariat Negara

Penanggung Jawab:

Setya Utama

Pengarah:

Eddy Cahyono Sugiharto

Pimpinan Redaksi:

Faisal Fahmi

Redaktur dan Kontributor:

Akhmad Firmannamal

Oky Tri Handoko

Khairunnisaa

Desain Grafis:

Wulan Nawangsari

Novanda Prayogatama

Sekretariat:

Guspita Rani

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	iii
BAB I - IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	1
1. Dasar Hukum	2
2. Pengelolaan Informasi Publik	5
3. Akses Informasi dan Pelayanan Publik	7
4. Ringkasan Akses Informasi	8
5. Daftar Informasi Publik	9
BAB II - KERJASAMA KEHUMASAN	10
1. Diseminasi Informasi Pelaksanaan Presidensi G20	11
2. Sambut Presidensi G20 Indonesia	12
3. Setneg Mantul Road to G20	13
4. Kick Off Setneg Mantul Road To G20	14
5. Tingkatkan Kompetensi Kehumasan Digital	15
6. Webinar Kehumasan: Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara	16
7. Setneg Mantul Road to G20 Edisi Labuan Bajo	17
8. Workshop Social Media Campaign For G20	18
9. Webinar Digital Workshop: Social Media Campaign for G20	19
10. Setneg Mantul Road to G20 Edisi Bali	20
11. Glorifikasi Inovasi dan Dukung Program MBKM	21
12. Jajaki Kolaborasi Kehumasan dan Dukung Perwujudan <i>Talent Digital</i>	22
13. Kunjungan Siswa SMP Prima Cendekia Islami dan SMAN 47 Jakarta	23
14. Kunjungan Biro Hubungan Masyarakat	24
15. Media Visit ke Tribun Jawa Barat	25
16. Diskusi Kehumasan	26
17. Kementerian Sekretariat Negara Gelar <i>Sharing Session</i>	27
18. Gelar Setneg Mantul, Tingkatkan Optimisme Generasi Muda	28
19. Kembangkan Program Prioritas Kehumasan Pemerintah	29
20. Webinar Keterbukaan Informasi Publik	30
21. Kuliah Umum Bagi Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta	31
22. Media Visit ke Lembaga Penyiaran Publik TVRI	32
23. Kemensetneg Kunjungi Diskominfo Kota Bogor	33
24. Kolaborasi Pengelolaan Isu Kebijakan Nasional dan Daerah	34

DAFTAR ISI

25. <i>Sharing Knowledge</i> Pengelolaan Informasi Publik	35
26. Rapat Koordinasi Penanganan Aksi Unjuk Rasa	36
BAB 3 - DISEMINASI INFORMASI	37
1. Highlight Presidensi G20 Indonesia 2022	38
2. Konten Kreatif	39
3. Laporan Kinerja Website dan Sosial Media	42
BAB IV - UNJUK RASA	46
BAB V - SURVEI KEPUASAN PENERIMAAN KUNJUNGAN MASYARAKAT	52
Pertanyaan dalam Bentuk Skala	53
Pertanyaan Ya/Tidak	54
Pertanyaan Isian	55
BAB VI - PENGHARGAAN	57
BAB VII - MONITORING DAN ANALISIS MEDIA	59



KATA PENGANTAR

Perjalanan Bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip demokrasi yang telah mengakar dalam nadi orang-orang Indonesia. Di dalam demokrasi, rakyat diberi kedaulatan penuh dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang dicanangkan oleh pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menjadi sebuah ruh dan nyawa bagi penyelenggaraan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, sehingga setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan serta didasari dengan keinginan luhur untuk menyejahterakan rakyat, terlebih lagi dengan mengedepankan keinginan masyarakat.

Di titik inilah, hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diimplementasikan. Kebebasan menyeluruh dan bertanggung jawab kepada rakyat untuk

menyampaikan pendapat dan pikirannya atas segala dinamika yang terjadi menjadi keistimewaan tersendiri dari prinsip demokrasi.

Para pendiri Bangsa Indonesia pun telah meletakkan hak setiap warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada masyarakat di dalam konstitusi negara pada Pasal 28E UUD 1945 "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Melalui pasal inilah, semangat untuk berkolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik diletakkan. Dengan kata lain, pemerintah perlu mendengar suara masyarakat untuk membentuk sebuah kebijakan yang solutif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Kementerian Sekretariat Negara sebagai sebuah institusi yang bertugas untuk memberikan pelayanan teknis, analisis, dan administratif kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara wajib berperan aktif dalam menghimpun aspirasi publik melalui proses komunikasi publik yang efektif dan efisien. Nantinya, aspirasi masyarakat yang dihimpun dapat menjadi pertimbangan bagi terciptanya peraturan dan kebijakan publik yang dapat memberikan dampak positif seluas-luasnya bagi masyarakat dan setiap permasalahan yang disampaikannya.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan langkah-langkah komunikasi publik yang aktif dan efektif yaitu mediasi aksi unjuk rasa dan penerimaan delegasi masyarakat. Dua jenis komunikasi publik ini menjadi cara-cara paling efektif untuk menampung aspirasi masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara serta menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan demi menciptakan proses edukasi masyarakat mengenai proses pemerintahan yang efektif dan efisien.



BAB I
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

© : Brodin pada Shutterstock

Dasar Hukum

Keputusan Menteri Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah ditetapkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, yang telah disesuaikan dengan perubahan struktur dan kebutuhan organisasi dan tata kerja kementerian.

Keputusan Menteri Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah ditetapkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, yang telah disesuaikan dengan perubahan struktur dan kebutuhan organisasi dan tata kerja kementerian.

**Keputusan Sekretaris Menteri
Sekretaris Negara Nomor 95 Tahun
2021 tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana
di Lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara**

Dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara, telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

**Standar Pelayanan dan Standard
Operating Procedures Pemberian
Informasi Publik Kepada Masyarakat
yang Berkaitan dengan Kementerian
Sekretariat Negara**

Dalam rangka mewujudkan Kementerian Sekretariat Negara sebagai badan publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, perlu dilakukan kegiatan pemberian informasi publik bagi masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara. Agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien, maka ditetapkan Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Kepada Masyarakat yang Berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan 8 (delapan) Standar Pelayanan Prosedur (SOP): 

- 
- SOP Pemberian Informasi Publik kepada masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara melalui pengumuman.
 - SOP Pemberian Informasi Publik kepada masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara melalui penanganan permohonan.
 - SOP Pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara.
 - SOP Penanganan sengketa informasi yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara melalui adjudikasi dan mediasi.
 - SOP Penyusunan dan penetapan Daftar Informasi Publik (DIP).
 - SOP Pengujian tentang konsekuensi terhadap informasi publik yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara
 - SOP Pendokumentasian informasi publik.
 - SOP Pendokumentasian informasi publik yang dikecualikan.

Maklumat Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Maklumat pelayanan PPID Kementerian Sekretariat Negara merupakan pernyataan tertulis yang memuat keseluruhan kewajiban dan janji PPID Kementerian Sekretariat Negara yang terdapat dalam standar pelayanan menyangkut pelayanan informasi kepada publik.

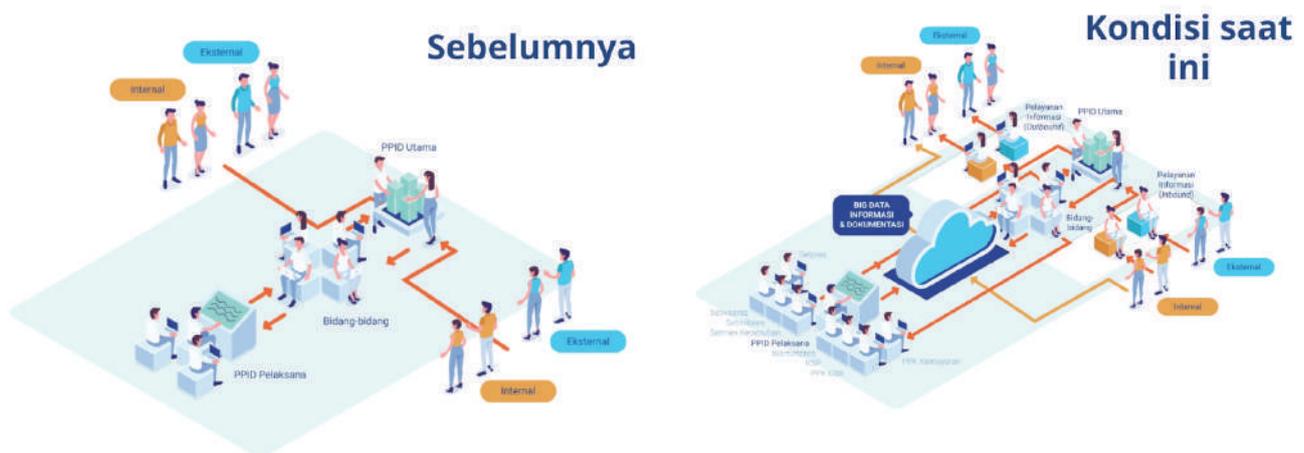
Sehubungan dengan hal tersebut, PPID Kementerian Sekretariat Negara menyatakan maklumat pelayanan sebagai berikut:

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Standar Pelayanan Pemberian informasi Publik kepada masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Sekretariat Negara secara responsif, akurat, santun, dan akuntabel.”

Pengelolaan Informasi Publik

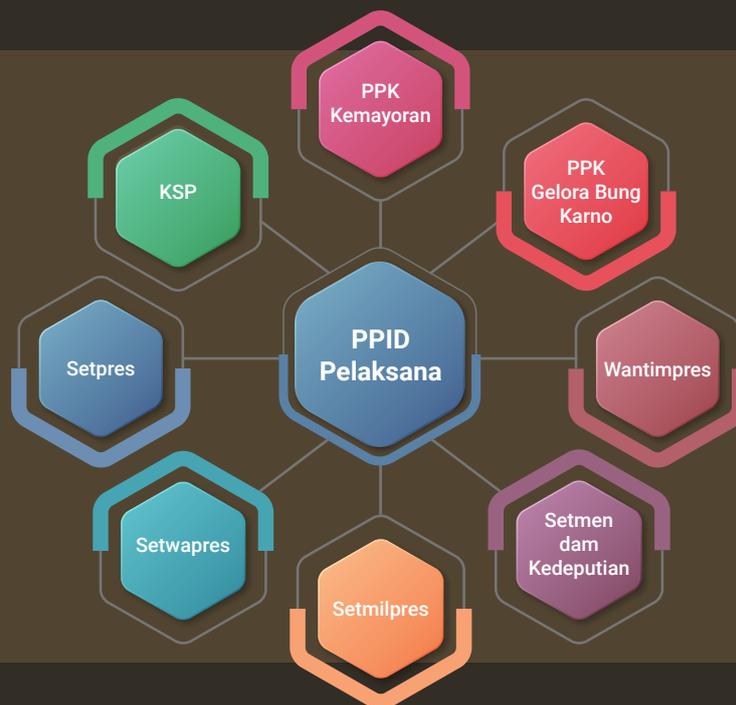


Pengelolaan Informasi Publik



Upaya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) untuk mengintegrasikan sistem dan data informasi publik sehingga pelayanan yang dilakukan dapat bertransformasi menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.

Struktur Organisasi PPID



- Kepmensesneg Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Penetapan PPID di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
- Kepmensesneg Selaku Pengarah/Atasan PPID Kemensetneg Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Penetapan PPID Pelaksana di Lingkungan Kemensetneg

The image shows a social media post from @PelayananKemensetneg. The profile information includes the name 'Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Sekretariat Negara'. The post features a QR code and a woman scanning it with her phone. The text in the post reads: 'Pindai QR Code di Atas atau Akses Melalui Tautan <https://linktr.ee/PelayananKemensetneg> untuk Melihat Daftar Pelayanan Publik Kementerian Sekretariat Negara'. The background of the post lists several public services: 'Alur Pelayanan Informasi Publik', 'Formulir Permohonan Informasi Publik', 'Penyampaian Surat Kepada Presiden, Wakil Presiden, Mensesneg dan/atau Kemensetneg', and 'Pengusulan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK)'. The footer of the post includes the website 'www.skn.go.id' and social media handles for Kemensetneg on various platforms.

Akses Informasi dan Pelayanan Publik

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan publik yang

dibutuhkan, salah satunya adalah dengan menyediakan pelayanan satu pintu melalui media sosial Kemensetneg, baik Facebook, Instagram, maupun Twitter.

Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi atau pelayanan hanya dengan memindai QR Code atau mengakses tautan yang tertera.

Ringkasan Akses Informasi

No.	Periode Tahun 2022	Jumlah Permohonan Informasi (lembaga/ individu)	Rata-Rata Waktu Penanganan Permohonan Informasi (hari)	Jumlah Informasi yang Diminta	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Publik
1.	Januari	9	7	9	6	3	Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID Kementerian ATR/BPN
2.	Februari	8	9	8	5	3	Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID Kementerian BKPM
3.	Maret	7	7	8	5	3	Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke Badan POM RI
4.	April	6	5	6	6	-	
5.	Mei	8	10	8	5	3	Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID Kementerian Perdagangan
6.	Juni	7	7	8	4	4	Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID OJK
7.	Juli	7	8	7	6	1	Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID ANRI
8.	Agustus	7	5	8	3	5	Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID KPK
9.	September	8	7	8	6	2	Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID Kemenkeu
10.	Oktober	-	-	-	-	-	
11.	November	1	8	1	-	1	Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID Kemenlu
12.	Desember	14	13	19	14	5	Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg dan telah diarahkan ke PPID Kemenhub
Total		82	89	90	60	30	

Daftar Informasi Publik

	Secara Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan	Jumlah
PPID Pelaksana Sekretariat Kementerian dan Kedeputian	246	142	-	258	646
PPID Pelaksana Sekretariat Presiden	62	-	-	-	62
PPID Pelaksana Sekretariat Wakil Presiden	13	-	-	-	13
PPID Pelaksana Sekretariat Militer Presiden	30	-	-	6	36
PPID Pelaksana Sekretariat Wantimpres	5	9	-	13	27
PPID Pelaksana Sekretariat KSP	27	11	-	9	47
PPID Pelaksana PPK GBK	18	-	-	-	18
PPID Pelaksana PPK Kemayoran	32	54	10	10	106
Total	433	162	10	286	955

BAB II

KERJA SAMA KEHUMASAN

(FGD/Webinar/Rapat Koordinasi Kehumasan/
Kunjungan Masyarakat)



Setneg Mantul Road to G20

"Digital Workshop with Meta:
Social Media Campaign for G20"





1. **Diseminasi Informasi Pelaksanaan Presideni G20**

Kolaborasi Bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo dan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Program Setneg Mantul jalin kolaborasi diseminasi informasi pelaksanaan Presideni G20, Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengadakan rapat koordinasi pada Senin (10/1) di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam acara yang diadakan secara luring tersebut, Shana Fatina, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo, bersama direksi lainnya menyampaikan terkait kesiapan Labuan Bajo menuju side event Presideni G20. Lebih lanjut, Dimas Aditya Nugraha, Koordinator Audio Visual dan Media Sosial Indonesia Baik dan GPR TV, Kominfo, menjelaskan peluang kerjasama diseminasi informasi melalui media sosial dan TV.

Sumber: Humas Kemensetneg



2. Sambut Presidensi G20 Indonesia

Kementerian Sekretariat Negara Kolaborasi dengan Kantor Staf Presiden

Menyambut penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesetneg) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) berkolaborasi dengan Deputi IV (Informasi dan Komunikasi Politik) Kantor Staf Presiden (KSP) dalam mengintegrasikan narasi untuk diseminasi informasi yang akan digaungkan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan Presidensi G20 pada Selasa (11/1) di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara.

Sumber: Humas Kemensesetneg



3. Setneg Mantul Road to G20

Berintegrasi dalam mendiseminasikan informasi terkait Presidensi G20 Indonesia, Sabtu (29/1), Kementerian Sekretariat Negara berpartisipasi dengan memperkenalkan Program Setneg Mantul Road to G20 dalam Kick Off Meeting yang digelar Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas).

GPR Together, GPR Stronger, merupakan tema yang diusung Kick Off Meeting tersebut untuk mengajak seluruh Humas Pemerintah bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan peran strategis dan komitmen Humas Pemerintah dalam mendukung diseminasi informasi publik yang membumi dan menyukseskan rangkaian kegiatan Presidensi G20.

Sumber: Humas Kemensetneg



4. Kick Off Setneg Mantul Road To G20

Menyambut penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara terus mengencangkan diseminasi informasi melalui Webinar Kick Off Setneg Mantul yang bertemakan “Membumikan Narasi, Menggalang Partisipasi, Menuju Presidensi G20 Indonesia” pada Jumat (4/2).

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan engagement, kolaborasi, dan keterlibatan dengan memaksimalkan peran para pemangku kepentingan dalam memberikan dukungan diseminasi dan penyampaian pesan efektif melalui narasi G20 yang membumi dan manfaat nyatanya bagi masyarakat Indonesia.

Kick Off Setneg Mantul Road To G20 ini diselenggarakan secara hybrid yang bertempat di Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara (PPKASN Kemensetneg) juga melalui aplikasi Zoom Meeting serta kanal resmi media sosial Youtube, Facebook, dan Instagram.

Sumber: Humas Kemensetneg



5. Tingkatkan Kompetensi Kehumasan Digital

Kementerian Sekretariat Negara Berkolaborasi dengan Meta Indonesia

Sebagai upaya menggaungkan Presidensi G20 melalui media sosial, Kementerian Sekretariat Negara berkolaborasi dengan Meta Indonesia menyelenggarakan workshop Pengelolaan Media Sosial “Social Media Campaign For G20” secara virtual pada Rabu (16/2).

Workshop yang diselenggarakan bertujuan membantu kesiapan Humas Kementerian/Lembaga dalam menyampaikan komunikasi terkait kepemimpinan Indonesia, kesiapan dan

pelaksanaan seluruh agenda pemerintah dalam G20 dan kemanfaatan nyata bagi masyarakat Indonesia.

Hadir sebagai narasumber Manager Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Dara Nasution; dan Manajer Kemitraan Pemerintah Meta Indonesia, Putu Yudha.

Sumber: Humas Kemensetneg



6. Webinar Kehumasan: Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara

Kementerian Sekretariat Negara Berkolaborasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas)

Jumat (25/2), Kementerian Sekretariat Negara bekerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan mengadakan kegiatan Webinar Kehumasan bertema "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)".

Webinar bertujuan mengglorifikasikan urgensi pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan visi dari pemindahan IKN terhadap kemajuan bangsa kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.

Sumber: Humas Kemensetneg

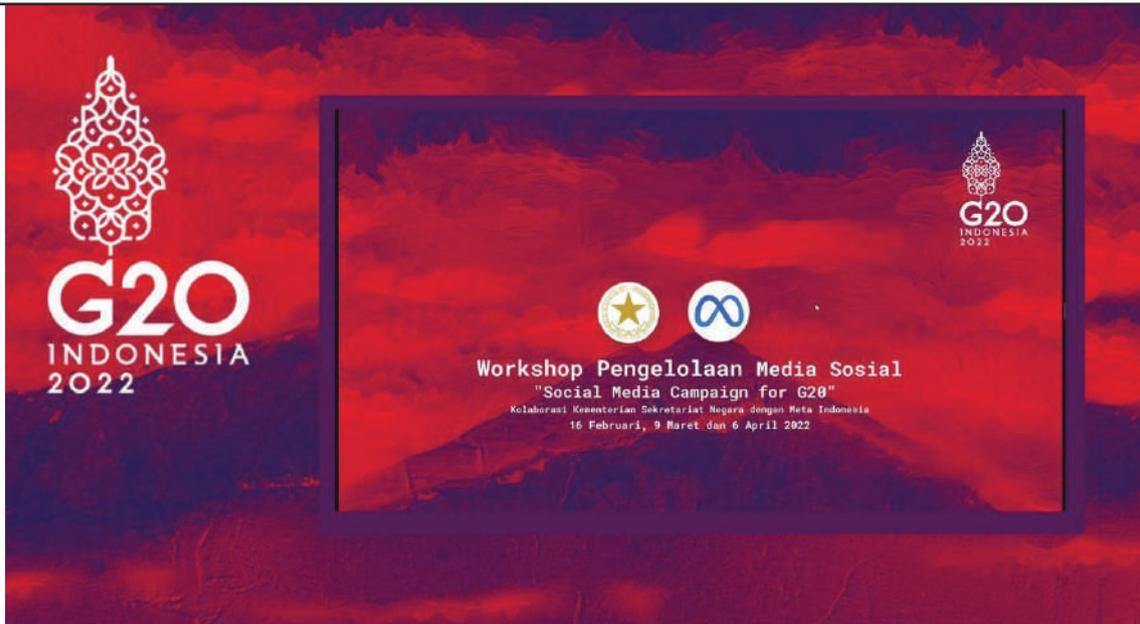


7. Setneg Mantul Road to G20 Edisi Labuan Bajo

Dalam upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi dan pariwisata nasional, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berkolaborasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Pemerintah, dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menyelenggarakan Setneg Mantul Road to G20 Edisi Labuan Bajo, pada Selasa (8/3).

Acara yang diselenggarakan secara hybrid di The Jayakarta Suites Komodo Flores Hotel ini bertujuan untuk menyampaikan kepada publik terkait kesiapan Labuan Bajo untuk menjadi salah satu tuan rumah *side event* #KTTG20, dan mendukung seluruh agenda pemerintah dalam G20.

Sumber: Humas Kemensetneg



8. Workshop Social Media Campaign for G20

Kementerian
Sekretariat Negara
Berkolaborasi dengan
Meta Indonesia

Berkolaborasi dengan Meta Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Media Sosial “Social Media Campaign For G20” sesi kedua secara virtual, Rabu (9/3). Workshop kali ini membahas mengenai praktik terbaik penggunaan media sosial instagram untuk pemerintah dan pemanfaat Business Suite dalam meningkatkan performa reels untuk menggaungkan Presidensi G20 ini.

Sumber: Humas Kemensetneg



9. Webinar Digital Workshop: Social Media Campaign for G20

Kementerian
Sekretariat Negara
Berkolaborasi dengan
Meta Indonesia

Bekerja sama dengan Meta Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyelenggarakan sesi ketiga Webinar Digital Workshop dengan tema “Social Media Campaign for G20”. Webinar ini dilaksanakan untuk mendorong serta mengedukasi Humas Kementerian maupun Lembaga pemerintahan pusat dan daerah dalam menggunakan Meta Family Apps, agar bisa mengoptimalkan kampanye digital perhelatan Presidensi G20.

Webinar sesi ketiga ini merupakan rangkaian Setneg Mantul Road to G20, guna meningkatkan kompetensi kehumasan dalam pengelolaan platform sosial media di era digitalisasi saat ini. Digital Workshop menghadirkan dua narasumber dari Meta Indonesia, Dara Nasution, Manajer Hubungan Pemerintah; dan Khwan Ruengkham, Manajer Kemitraan Meta Asia-Pasifik.

Sumber: Humas Kemensetneg



10. Setneg Mantul Road to G20 Edisi Bali

Kemensetneg bekerja sama dengan Pemerintah Kota Denpasar dan Badan Kreatif Denpasar menggelar webinar Setneg Mantul Road to G20 Edisi Bali dengan tema "G20 Sebagai Momentum Akselerasi Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata Bali".

Webinar yang diselenggarakan secara hybrid, luring di Meeting Room Jumpa Kopi 74, Denpasar, Bali dan daring melalui Aplikasi Zoom Meeting, pada Senin (23/05), dibuka oleh Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Sumber: Humas Kemensetneg



11. Glorifikasi Inovasi dan Dukung Program MBKM

Kementerian
Sekretariat Negara
Sambangi Universitas
Multimedia Nusantara

Sebagai upaya membangun jejaring komunikasi eksternal guna mengoptimalkan glorifikasi beragam inovasi dan mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Biro Humas Kemensetneg menyambangi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Senin (6/6).

Kegiatan bertujuan untuk membangun sinergitas antara Kemensetneg dengan institusi pendidikan dalam rangka mengakselerasi transformasi digital guna menyiapkan SDM Unggul melalui penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta mengoptimalkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Sumber: Humas Kemensetneg



12. Jajaki Kolaborasi Kehumasan dan Dukung Perwujudan Talent Digital

Kementerian
Sekretariat Negara
Kunjungi Binar
Academy

Dalam rangka mendukung agenda prioritas Menteri Sekretaris Negara untuk menumbuhkan ekosistem inovasi, Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekretariat Negara) menjajaki kolaborasi dengan Binar Academy di The Breeze, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Senin (6/6).

Binar Academy sebagai pembelajaran berbasis teknologi yang dibangun oleh anak bangsa telah berhasil menjadi lembaga pendidikan yang berpengaruh dalam mempersiapkan talent digital, menunjang pendidikan untuk semua kalangan masyarakat dengan menyediakan platform belajar digital. Diharapkan dengan kunjungan ini dapat tercipta kolaborasi di bidang diseminasi kehumasan dan mendukung penciptaan talent digital dan transformasi digital, sehingga dapat bermanfaat nyata dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul untuk Indonesia Maju.

Sumber: Humas Kemensekretariat Negara



13. Kunjungan Siswa SMP Prima Cendekia Islami dan SMAN 47 Jakarta

Selasa (14/6), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) menerima kunjungan siswa SMP Prima Cendekia Islami dan SMAN 47 Jakarta secara hybrid dengan tema "Ciptakan Gen Z Unggul dengan Digital", berkolaborasi dengan Binar Academy. Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ini diadakan di Aula Utama Gedung III, Kementerian Sekretariat Negara.

Materi dibawakan oleh Head of Marketing Communication Binar Academy, Ogi Wicaksana dan Pranata Humas Ahli Madya Kemensekneg, Faisal Fahmi. Turut hadir Staf Ahli Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kemensekneg, Dadan Wildan, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensekneg, Eddy Cahyono Sugiarto.

Sumber: Humas Kemensekneg



14. Kunjungan Biro Hubungan

Masyarakat
Ke Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN
Sunan Gunung Djati
Bandung

Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berkunjung ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung pada Kamis (23/6).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menjalin kerja sama, kolaborasi, bertukar informasi, berdiskusi, dan berbagi pengalaman guna penajakan dan mendukung Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM).

Sumber: Humas Kemensetneg



15. Media Visit ke Tribun Jawa Barat

Kamis (23/6), Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) disambut Pemimpin Redaksi, Adi Sasono saat melakukan media visit ke Tribun Jabar.

Biro Humas Kemensetneg mengglorifikasikan pencapaian program pemerintah, mengajak media bersama mendiseminasikan Presidensi G20 Indonesia serta berbagi pengalaman tentang pengelolaan news room dan penyusunan agenda setting dengan jajaran redaksi Tribun Jabar.

Sumber: Humas Kemensetneg



16. Diskusi Kehumasan

Berkolaborasi dengan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Muda

Jumat (05/08), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerima kunjungan PERHUMAS (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia) Muda Jakarta Raya di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto menyambut baik kehadiran Ketua PERHUMAS Muda Jakarta Raya, Muhammad Pandu Ariane dan Wakil Ketua PERHUMAS Muda Jakarta Raya, Ensi Rama Putra beserta jajaran.

Berada di bawah naungan PERHUMAS Indonesia, PERHUMAS Muda merupakan organisasi yang mewadahi pemuda-pemudi berasal dari kalangan mahasiswa untuk dapat belajar tentang kehumasan serta menjalin jejaring sosial. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Ketua PERHUMAS Muda Jakarta Raya, Muhammad Pandu Ariane pun mengungkapkan tujuan dari

kunjungan jajarannya untuk dapat melakukan sharing session dengan Kemensetneg terkait dunia kehumasan di Kemensetneg.

Sumber: Humas Kemensetneg



17. Kementerian Sekretariat Negara Gelar *Sharing Session*

Bersama London School of Public Relations (LSPR)

Bertempat di Aula Serbaguna, Gedung 3, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto menerima kunjungan dari salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) London School of Public Relations (LSPR), yakni LSPR Youth Diplomacy Community (YDC), Selasa (9/8).

LSPR YDC merupakan UKM di bawah naungan LSPR yang fokus pada isu nasional dan internasional. Fellycia Alkira Simanjuntak, selaku Presiden LSPR YDC menyampaikan maksud dari kunjungan bersama jajarannya adalah untuk melakukan sharing session dengan

Kemensetneg terkait dunia Kehumasan di lingkungan Kemensetneg.

Sumber: Humas Kemensetneg



18. Gelar Setneg Mantul, Tingkatkan Optimisme Generasi Muda

Dalam rangka meningkatkan optimisme para generasi muda sebagai ujung tombak kemajuan bangsa menuju Indonesia maju 2045, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menggelar Setneg Mantul, di Aula Serbaguna Gedung III Kemensetneg, Jumat (19/8).

Kegiatan dihadiri oleh 60 orang peserta yang merupakan perwakilan dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan juga sebagai Peserta Jambore Nasional XI Tahun 2022.

Dalam Setneg Mantul kali ini, Kemensetneg menghadirkan Staf Khusus Presiden, Gracia Billy Mambrasar sebagai narasumber yang menyampaikan tugas-tugas yang diembannya sebagai Staf Khusus Presiden. Billy juga membagikan

kisah inspiratifnya, bagaimana para generasi muda harus berperan aktif untuk kemajuan bangsa.

Sumber: Humas Kemensetneg



19. Kembangkan Program Prioritas Kehumasan Pemerintah

Kementerian
Sekretariat Negara
Gelar Setneg Mantul
Goes to Campus di
Kampus Interstudi

Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menggelar Setneg Mantul (Mantap Betul) Goes to Campus di Kampus Interstudi, Jakarta pada Selasa (18/10). Hadir sebagai narasumber, Staf Khusus Presiden, Ayu Kartika Dewi dan Kepala Biro Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto.

Bertemakan Spirit of Milenials, Semangat Indonesia Maju “Membumikan Narasi, Memantik Simpati, Membangun Partisipasi”, Kemensetneg berupaya mengembangkan program prioritas pelayanan informasi dan Kehumasan pemerintah/government public relations dalam mendukung kesuksesan Indonesia menyelenggarakan KTT G20.

Sumber: Humas Kemensetneg



20. Webinar Keterbukaan Informasi Publik

Senin (28/11), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran menyelenggarakan webinar bertema “Transformasi Kehumasan Pemerintah Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta.

Kegiatan ini merupakan upaya Kemensetneg dalam membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kepercayaan, reputasi, dan keterlibatan (engagement) publik pada setiap derap langkah organisasi, khususnya untuk terus meningkatkan layanan kehumasan pemerintah.

Sumber: Humas Kemensetneg



21. Kuliah Umum Bagi Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berkolaborasi dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kamis (8/12), mengadakan kuliah umum komunikasi politik bagi mahasiswa S1 dan S2 yang membahas mengenai Strategi Komunikasi Media Baru Kemensetneg dengan Studi Kasus: Agenda Kenegaraan Presidensi G20 Tahun 2022. Kuliah umum ini diisi oleh Eddy Cahyono Sugiarto, Kepala Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Eddy Cahyono memaparkan mengenai inovasi kehumasan yang dilakukan, seperti inovasi konten dalam mendiseminasikan informasi dengan pemanfaatan media baru sebagai strategi komunikasi publik Kemensetneg, dalam membangun awareness dan engagement publik terhadap kerja-kerja Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara.

Sumber: Humas Kemensetneg



22. Media Visit ke Lembaga Penyiaran Publik TVRI

Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengunjungi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, Jakarta Pusat pada Selasa (13/12).

Diterima Direktur Program dan Berita TVRI beserta jajaran, kunjungan (media visit) Tim Humas Kemensetneg dilakukan dalam rangka menjalin kerja sama, kolaborasi, berdiskusi, dan knowledge sharing tentang pengelolaan news room serta penyusunan agenda setting.

Sumber: Humas Kemensetneg



23. Kemensetneg Kunjungi Diskominfo Kota Bogor

Kamis (15/12), Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan rapat koordinasi ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bogor, Jawa Barat.

Rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat yang diwakili Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, R. Efa Febryana dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Diskominfo Kota Bogor, Abdul Manan Tampubolon dan jajarannya. Humas Kemensetneg berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh PPID di Diskominfo Kota Bogor serta menjalin kerja sama kehumasan ke depan.

Sumber: Humas Kemensetneg



24. Kolaborasi Pengelolaan Isu Kebijakan Nasional dan Daerah

Kementerian
Sekretariat Negara
Berkunjung Ke Harian
Metropolitan Bogor

Dalam rangka menjalin kolaborasi mengenai pengelolaan isu kebijakan nasional dan daerah, Biro Humas Kemensetneg yang diwakili oleh Pranata Humas Ahli Madya, R. Efa Febryana dan tim melakukan kunjungan media (media visit) ke Harian Metropolitan, Kota Bogor, Jawa Barat yang bertempat di Gedung Graha Pena, Kamis (15/12).

Kunjungan diterima langsung oleh Pemimpin Redaksi Harian Metropolitan beserta jajaran. Di samping berbagi pengalaman pengelolaan isu, kunjungan mendiskusikan tentang glorifikasi kerja pemerintah dan tantangan media lokal saat ini.

Sumber: Humas Kemensetneg



25. Sharing Knowledge Pengelolaan Informasi Publik

Kementerian
Sekretariat Negara
Kunjungi Diskominfo
Kabupaten Bogor

Dalam rangka menjalin kolaborasi pengelolaan informasi publik dan sharing knowledge strategi komunikasi publik, Biro Humas Kemensetneg yang diwakili oleh Analis Humas, Akhmad Firmannamal, dan tim melakukan kunjungan ke Dinas Kominfo Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/12).

Kunjungan diterima langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Iwan Setiawan, beserta jajaran. Di samping berbagi pengalaman pengelolaan informasi publik, kunjungan mendiskusikan tentang penanganan permohonan informasi, glorifikasi kerja pemerintah dan tantangan media lokal saat ini.

Sumber: Humas Kemensetneg



26. Rapat Koordinasi Penanganan Aksi Unjuk Rasa

Senin (26/12), Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Pemantauan Isu Unjuk Rasa secara hybrid (luring dan daring) dengan peserta rakor terdiri atas Kabag Operasi Polres Metro Jakarta Pusat (mewakili Kapolres Metro Jakarta Pusat), Kanit Intelkam Polsek Metro Gambir (mewakili Kapolsek Gambir), Biro Pengamanan Setmilpres, Kantor Staf Presiden, Kepala UPK Monas, Disparekraf DKI Jakarta, dan Sekretaris Program Studi Universitas Al Azhar Indonesia.

Rakor ini diadakan dalam rangka penguatan sinergitas antar K/L dan evaluasi penanganan unjuk rasa di lingkungan Lembaga Kepresidenan khususnya terkait penanganan isu potensial dan mitigasi yang diperlukan dengan membangun komitmen bersama (taking ownership) agar penanganan dapat berjalan lancar dan menjamin ketertiban umum.

Sumber: Humas Kemensetneg

BAB III

DISEMINASI INFORMASI



© : FarisFitrianto pada Shutterstock.com

Geliat dunia digital yang semakin masif dan meluas ke seluruh kalangan membuat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu dengan cepat berpindah dari manual ke digital, utamanya dalam proses diseminasi program-program Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara. Tak hanya menunjukkan bahwa Kemensetneg juga *agile* terhadap perubahan dunia, penggunaan *platform* digital memberikan tantangan serta peluang bagi Kementerian Sekretariat Negara untuk dapat mendiseminasikan langkah dan program pemerintah secara cepat, tepat, masif, dan terukur. Pengukuran yang terdapat pada *platform* digital dapat digunakan oleh Kemensetneg sebagai dasar pengukuran dan metode komunikasi yang baik kepada masyarakat.

Guna memaksimalkan penggunaan *platform* digital dan mengoptimalkan upaya diseminasi informasi, Kemensetneg membangun website www.setneg.go.id serta pemanfaatan sosial media, antara lain Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan yang terbaru TikTok. Pemilihan media sosial tersebut didasari dari tingkat keaktifan warga Indonesia menggunakan berbagai *platform* tersebut.

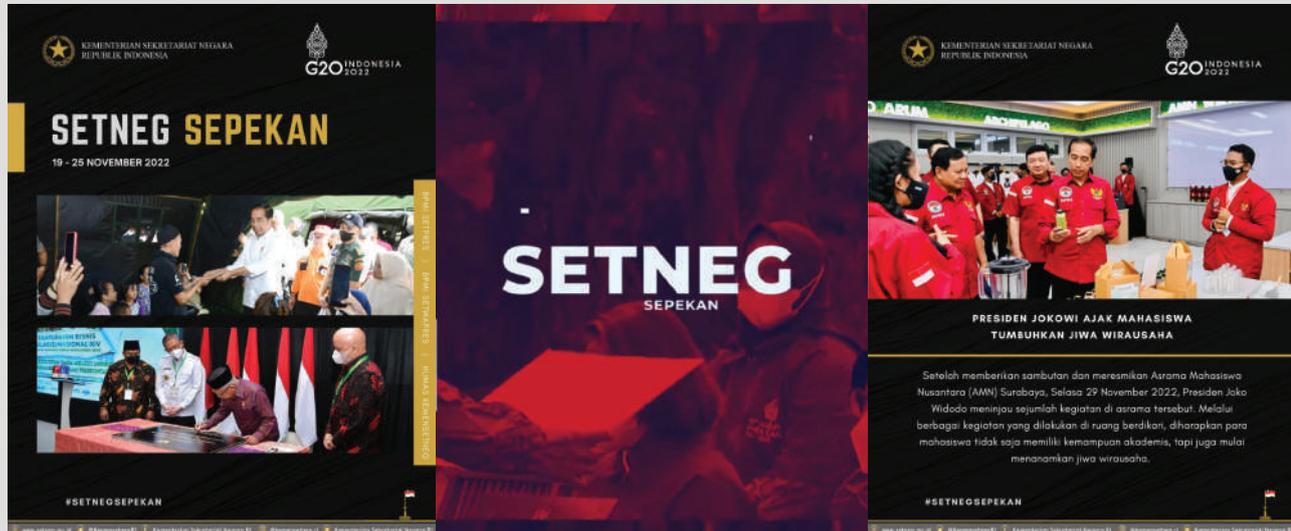
1. Highlight Presidensi G20 Indonesia 2022

Guna mengglorifikasikan rangkaian kegiatan perhelatan akbar Presidensi G20 Indonesia dan membantu mengoptimalisasi komunikasi publik yang efektif dalam penyampaian komunikasi terkait agenda pemerintah dalam perhelatan KTT G20 kepada masyarakat umum, Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah melakukan publikasi melalui berbagai kanal media sosial sebanyak:

Instagram	139 Konten
Twitter	73 Konten
Facebook	63 Konten
Website	25 Konten
Youtube	33 Konten
Total	333 Konten

2. Konten Kreatif

a. Setneg Sepekan



Setneg Sepekan merupakan cara komunikasi baru yang digagas oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemenseksetneg) dalam menginformasikan kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara/Kementerian Sekretariat Negara dalam periode satu minggu pada publik.

b. Setneg Sepekan



SetnegPedia merupakan salah satu media penyebar informasi kepada publik yang diinisiasi oleh Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). SetnegPedia menjadi konten yang berisi informasi-informasi terkini mengenai program Kemensetneg dan juga pemerintah pada umumnya, baik yang telah, sedang, maupun yang akan dilakukan.

c. Setneg Real



Setneg Real merupakan konten kreatif yang dikembangkan oleh Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam bentuk video kekinian yang mengikuti tren saat ini. Konten kekinian ini dapat menjadi sumber informasi positif kepada masyarakat.

d. SPACE (Setneg Punya Cerita)



SPACE (Setneg Punya Cerita) merupakan artikel liputan yang dimuat di website dan media sosial Kemensetneg. SPACE berisi wawancara dengan Pimpinan Tinggi Madya, ASN berprestasi, atau unsur SDM di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). yang antara lain mengupas tentang tugas dan fungsi satuan kerja, inovasi yang telah dilakukan manajemen kepemimpinan, pembahasan ringan seputar kegiatan personal di luar kesibukan kerja, cerita inspiratif lainnya yang dapat menjadi informasi positif kepada masyarakat.

3. Laporan Kinerja Website dan Sosial Media

Untuk mendukung efektifnya proses diseminasi program pemerintah, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan evaluasi yang berasal dari data-data pengguna yang berada di *platform* media Kemensetneg. Upaya ini dilakukan dengan memonitor jumlah pengunjung *website* setiap harinya, ataupun jumlah interaksi di media sosial pada konten-konten yang disajikan oleh Kemensetneg. Tentunya, Kemensetneg mencoba menyesuaikan dengan demografi dari pengguna yang terdapat pada *website* maupun media sosial Kemensetneg.



Selain itu, guna meningkatkan kapasitas dari administrator *website* dan media sosial Kemensetneg, pejabat/pegawai Kemensetneg, khususnya di Biro Hubungan Masyarakat (Humas), membekali diri dengan berbagai seminar dan kelas yang bekerja sama dengan banyak pihak, salah satunya Meta Indonesia. *Insight - insight* yang disajikan oleh Meta Indonesia tentunya menjadi catatan berharga bagi Kemensetneg dalam membangun *trust* dan *branding* di media sosial. *Branding* Kemensetneg yang baik tentunya menjadi sebuah privilese bagi Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara yang setiap detil pekerjaannya menjadi tugas dan fungsi dari Kemensetneg.

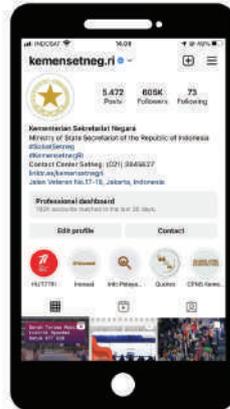
a. Audience Overview - Website 2022

Pengguna	1.389.168
Pengguna baru	1.390.014
Jumlah sesi per pengguna	1,24
Tayangan halaman	2.542.441
Halaman/sesi	1,47
Durasi sesi rata-rata	00:01:08
Rasio Pantulan	79,25%

b. Behaviour Overview - Website 2022

Halaman Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Ke-77 RI Tahun 2022	13,65%
Beranda	11,14%
Halaman Artikel Pembangunan SDM Menuju Indonesia Unggul	3,01%
Halaman Artikel Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia	2,6%
Halaman Artikel Membuka Catatan Sejarah Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus 1945	1,94%

c. Media Sosial



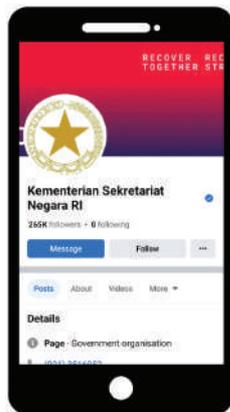
Instagram @kemensetneg.ri

- Bergabung: 7 Agustus 2017
 - Verifikasi: 8 Agustus 2017
 - Followers (Pengikut): 628K+
- Impressions 30 hari terakhir: 1.456.196

Sumber: Insight Instagram

Laporan Kinerja Website dan Media Sosial

Data per 1 Juni 2023



Facebook Kementerian Sekretariat Negara

- Bergabung: 9 Oktober 2015
 - Verifikasi: 12 November 2015
 - Followers (Pengikut): 265+
- Impressions/reached 30 hari terakhir: 38.652

Sumber: Page Insight Facebook

Laporan Kinerja Website dan Media Sosial

Data per 1 Juni 2023



Twitter @KemensetnegRI

- Bergabung: 18 September 2015
 - Verifikasi: 23 September 2015
 - Followers (Pengikut): 698K+
- Impressions 30 hari terakhir: 236K

Sumber: Twitter Analytics

Laporan Kinerja Website dan Media Sosial

Data per 1 Juni 2023



Youtube
Kementerian Sekretariat Negara

- Bergabung: 18 September 2015
- Verifikasi: 23 September 2015
- Followers (Pengikut): 204K+
- Impressions 30 hari terakhir: 3.638.113

Sumber: Youtube Analytics

Laporan Kinerja Website dan Media Sosial Data per 1 Juni 2023

d. Behaviour Overview - Website 2022

1. Pertumbuhan Followers Instagram

Follower Baru	53.699
Total Follower	614.078

2. Pertumbuhan Followers Twitter

Follower Baru	67.959
Total Follower	659.936

3. Pertumbuhan Subscriber Youtube

Subscribers Baru	26.704
Total Subscribers	197.773

4. Pertumbuhan Followers Facebook

Follower Baru	2.184
Total Follower	263.831

BAB IV UNJUK RASA



Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia telah mengatur dan menegaskan bahwa Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negara, namun dengan batasan-batasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan menurut konstitusi bukanlah kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, tapi kebebasan yang bertanggung jawab dengan memperhatikan hak-hak orang lain di sekitar.

Salah satu kebebasan yang dikelola oleh UUD 1945 adalah kebebasan untuk dapat menyampaikan aspirasi di muka umum atau yang sering disebut sebagai unjuk rasa. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 yang menyebutkan "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Oleh karena itu, proses penyampaian pendapat oleh setiap elemen masyarakat tentu juga harus dasari oleh hukum dan undang-undang

sehingga pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 9 memberikan bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Terdapat empat bentuk penyampaian pendapat yang diatur dalam undang-undang, antara lain unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan/atau mimbar bebas.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 9 memberikan bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Terdapat empat bentuk penyampaian pendapat yang diatur dalam undang-undang, antara lain unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan/atau mimbar bebas.

a.	Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
b.	Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai.
c.	Pemberitahuan memuat maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta.
d.	Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.
f.	Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib: <ul style="list-style-type: none"> ● segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan ● berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum ● berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat ● mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute
g.	Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

Selain tata cara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur soal pelanggaran di saat pelaksanaan penyampaian aspirasi di muka umum serta sanksi yang menjerat pelaku. Hal ini tentu menegaskan bahwa kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi menjadi nilai yang penting bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia sehingga perlu dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggungjawab.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa "pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikenakan apabila terjadi perbuatan melanggar hukum seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang, dan bahkan kematian."

Untuk menghindari pelanggaran tersebut, para peserta atau pelaksana penyampaian pendapat perlu memahami landasan penyampaian dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998, yakni:

- a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
- b. Asas musyawarah dan mufakat
- c. Asas kepastian hukum dan keadilan
- d. Asas proporsionalitas
- e. Asas manfaat



Kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia juga turut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang menerangkan mengenai tata cara, mekanisme, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan penyampaian pendapat kepada instansi atau pihak tertentu, seperti kepada Kementerian atau Presiden.



Peraturan itu menjadikan Lingkungan Lembaga Kepresidenan sebagai sebuah tempat yang bernilai strategis dalam menyuarakan aspirasi dan pendapat masyarakat sekaligus menjadi tempat yang paling dilindungi karena didalamnya menyangkut harkat dan martabat seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia. Pada beberapa kesempatan, masyarakat diperkenankan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi keluhan kesah dari masyarakat.

Dalam hal penanganan aksi penyampaian pendapat di muka umum secara langsung kepada Presiden, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Kementerian Sekretariat Negara sebagai dengan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Pasal 3 Poin E tentang Kementerian Sekretariat Negara.

Di dalam peraturan tersebut, Kementerian Sekretariat Negara mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan masyarakat dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri. Selanjutnya, Kementerian Sekretariat Negara bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi garda terdepan yang menjamin pelaksanaan aksi penyampaian pendapat di muka umum, khususnya di Lingkungan Istana Kepresidenan, berlangsung tertib, responsif, dan kondusif.

Pada Tahun 2022, aksi unjuk rasa diwarnai dengan berbagai tuntutan dengan permasalahan yang menonjol di antaranya terkait penolakan UU Cipta Kerja, Penolakan kenaikan harga BBM, permasalahan pemekaran Papua hingga tuntutan penyelesaian permasalahan HAM.

Penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat pada tahun 2022 sebanyak 116, berikut ini adalah beberapa contoh penanganan unjuk rasa:



1. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menemui secara langsung massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang melakukan unjuk rasa terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Tugu Arjuna Widjaja (Patung Kuda), Jakarta, pada Senin, 12 September 2022. Kasetpres mengatakan bahwa tuntutan para buruh akan segera ditindaklanjuti.
2. Antisipasi unras terkait kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Silang Monas Barat Daya/ Patung Kuda Indosat (19/9/2022).
3. Antisipasi unras oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta di Silang Monas Barat Daya/ Patung Kuda Indosat terkait kenaikan harga BBM bersubsidi pada tanggal 19 September 2022.
4. Antisipasi unras oleh BEM SI, Cipayung Plus SI, Buruh SI di Silang Monas Barat Daya/ Patung Kuda Indosat, dengan jumlah sekitar 300 orang terkait kenaikan harga BBM bersubsidi pada tanggal 19 September 2022.

BAB V

SURVEI KEPUASAN PENERIMAAN KUNJUNGAN MASYARAKAT



Capaian outcome untuk indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara dari target indeks pelayanan 4,05 skala 6, telah terealisasi sebesar 5,10 skala 6.

Hasil tersebut menggambarkan bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dalam memberikan layanan informasi kepada kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi tentang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), baik secara materi yang diberikan maupun layanan secara umum, berada di atas target indeks pelayanan.

Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kemensetneg tahun 2022 memiliki 6 (enam) komponen penilaian dan diukur menggunakan skala Likert (1 s.d. 6) dengan urutan 1 = sangat tidak memuaskan; 2 = tidak memuaskan; 3 = kurang memuaskan; 4 = cukup memuaskan; 5 = memuaskan; dan 6 = sangat memuaskan.

Pelaksanaan kegiatan survei dilaksanakan melalui pengukuran penilaian pelayanan publik terhadap pernyataan sebagai berikut.

A Pertanyaan dalam Bentuk Skala

1. Kemudahan prosedur layanan publik yang diselenggarakan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
2. Kecepatan layanan publik yang diselenggarakan Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
3. Ketepatan penyelesaian layanan publik terhadap janji waktu pelayanan yang diselenggarakan Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
4. Manfaat dari kegiatan layanan publik yang telah dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

5.	Penguasaan dan kemampuan penyajian materi/informasi yang disampaikan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
6.	Kedisiplinan petugas dalam memberikan layanan publik
7.	Tanggung jawab petugas dalam memberikan layanan publik
8.	Kemampuan/kompetensi petugas dalam memberikan layanan publik
9.	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan publik
10.	Tingkat kenyamanan pada lokasi kegiatan layanan publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
11.	Kondisi fasilitas yang digunakan dalam kegiatan layanan publik (ruangan auditorium, lobby, ruang ibadah, toilet, dan fasilitas bagi difabel)
12.	Kondisi utilitas pada lokasi kegiatan layanan publik (air, pendingin ruangan, listrik, penerangan, jaringan internet, lift/elevator, dan alat pendukung K3).

B Pertanyaan Ya/Tidak

Apakah ada pungutan atas layanan publik yang diberikan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.

Pertanyaan Isian

Apakah ada pungutan atas layanan publik yang diberikan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.

1. Informasi/layanan publik lain terkait dengan Kementerian Sekretariat Negara, yang dibutuhkan.
2. Berikan kritik/saran Anda guna perbaikan layanan publik yang diberikan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

Pada tahun 2022 dilaksanakan penilaian terhadap layanan publik yang diselenggarakan dalam menerima 8 (delapan) kunjungan perwakilan masyarakat dari perguruan tinggi, sekolah, dan instansi pemerintah ke Kementerian Sekretariat Negara, yaitu:

1. STIKOM Interstudi
2. SMP Prima Cendekia Islami
3. SMA Negeri 47 Jakarta
4. Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Muda
5. London School of Public Relations (LSPR)
6. Peserta Jambore Nasional XI Tahun 2022
7. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
8. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Dari keseluruhan kegiatan penerimaan delegasi tahun 2022, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) mendapatkan nilai 5,10 dari nilai keseluruhan 6. Nilai ini diambil dari nilai rata-rata yang didapat pada tiap indikator. Nilai tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi dan benchmark bagi Kemensekneg dalam menyelenggarakan kegiatan penerimaan delegasi masyarakat untuk terus mengemban dan meningkatkan layanan informasi kepada publik. Selain itu, nilai tersebut menjadi komitmen Kemensekneg dalam menjadi saluran aspirasi masyarakat yang akan ditujukan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara.



BAB VI PENGHARGAAN





Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berhasil tampil sebagai kandidat terbaik dalam tiga kategori pada ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2022 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Yogyakarta Marriott Hotel, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis, 24 November 2022.

Mengusung tema “Semangat Humas untuk Indonesia Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”, Kemensetneg berhasil meraih penghargaan pada kategori Media Sosial, Website, dan Audio Visual. Dari tiga nominasi kategori tersebut, Kemensetneg

menyabet dua penghargaan yaitu sebagai **TERBAIK II “AMH 2022 Kategori Website”** dan **TERBAIK II “AMH 2022 Kategori Media AudioVisual”**.

BAB VI
MONITORING DAN ANALISIS MEDIA

Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Januari 2022



1. Ekspos dan isu pemberitaan. Frekuensi pemberitaan mengenai Kemensetneg mencapai 1.852 artikel (media *online*), 91 artikel (media cetak) dan 3 tayangan (media TV). Tiga isu utama pemberitaan di masing-masing media, yaitu sebagai berikut: _____

a. Di media *online*, isu yang mendominasi yaitu kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Barat (NTB) (33%); pengesahan RUU Ibu Kota Negara (IKN) (19%); dan penambahan jabatan wakil menteri (Wamen) (12%).

b. Di media cetak, isu yang mendominasi yaitu pengesahan RUU IKN (29%); kunjungan kerja Presiden ke NTB (14%); dan penambahan jabatan wamen (13%).

c. Di media televisi, isu yang muncul berkaitan dengan jadwal pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN baru.

- 2. Sentimen pemberitaan.** Sentimen pemberitaan mengenai Kemensetneg cenderung Netral di media *online* (52%) dan media cetak (57%). Hal ini didorong oleh ramainya atensi media memberitakan seputar agenda kepresidenan, pelantikan tiga duta besar RI untuk negara sahabat, dan pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama (NU) di Balikpapan. —————
- 3. Top person.** Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden RI (1.368 pemberitaan), Mensesneg (1.134 pemberitaan), dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (480 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Presiden RI (66 pemberitaan), Mensesneg (39 pemberitaan), dan Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini (10 pemberitaan). —————
- 4. Ekspos produk perundang-undangan.** Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media antara lain: —————

a. Rancangan Undang-undang IKN (70 berita);

b. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (3 berita);

c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviarsi Pariwisata Indonesia (1 berita); dan

d. PP Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (1 berita).

Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Februari 2022



1. Ekspos dan isu pemberitaan. Frekuensi pemberitaan mengenai Kemensetneg mencapai 2.652 artikel (media *online*), 66 artikel (media cetak) dan 10 tayangan (media TV). Tiga isu utama pemberitaan di masing-masing media, yaitu sebagai berikut:

a. Di media *online*, isu yang mendominasi yaitu mengenai polemik aturan jaminan hari tua (JHT) (20%); pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) (18%); dan vaksinasi Covid-19 (13%).

Di media cetak, isu yang mendominasi yaitu polemik aturan JHT
b. (37%); pemindahan IKN (24%); dan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) (9%).

Di media televisi, isu yang muncul berkaitan dengan polemik aturan
c. JHT (56%), pengadaan mobil dinas Istana (13%), dan wacanan penundaan Pemilu 2024 (11%).

2. **Sentimen pemberitaan.** Sentimen pemberitaan mengenai Kemensetneg cenderung Netral di media *online* (43%) dan positif di media cetak (45%). Hal ini didorong oleh ramainya pemberitaan seputar pernyataan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan untuk merevisi aturan JHT yang baru diterbitkan. _____

3. **Top person.** Dalam lingkup top person di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden RI (1.9708 pemberitaan), Mensesneg (1.345 pemberitaan), dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (376 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, top person secara berurutan yaitu Presiden RI (99 pemberitaan), Mensesneg (66 pemberitaan), dan Menteri Ketenagakerjaan (39 pemberitaan). _____

Ekspos produk perundang-undangan. Produk perundang-undangan yang

4. muncul dalam pemberitaan media antara lain: _____

a. Keputusan Presiden RI Nomor 21/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (64 berita);

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (3 berita); dan

c. Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (3 berita).

Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Maret 2022



1. Ekspos dan isu pemberitaan. Frekuensi pemberitaan mengenai Kemensetneg mencapai 3.025 artikel (media *online*), 164 artikel (media cetak) dan 1 tayangan (media TV). Tiga isu utama pemberitaan di masing-masing media, yaitu sebagai berikut:

a. Di media *online*, isu yang mendominasi yaitu mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) (28%); kunjungan kerja Presiden ke Nusa Tenggara Timur (NTT) (22%); dan Presidensi G20 Indonesia (12%).

b. Di media cetak, isu yang mendominasi yaitu pembangunan IKN (37%); Presidensi G20 Indonesia (14%); dan kunjungan kerja Presiden ke NTT (13%).

c. Di media televisi, isu yang muncul berkaitan dengan penghargaan Setneg X Innovation Award.

2. Sentimen pemberitaan. Sentimen pemberitaan mengenai Kemensetneg cenderung Positif di media *online* (46%) dan Netral di media cetak (44%). Hal ini didorong oleh ramainya pemberitaan tentang isu agenda kepresidenan, seperti kunjungan kerja Jokowi ke NTT, hadirnya Presiden dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (APDESI), serta peninjauan Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. —————

3. Top person. Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden RI (2.423 pemberitaan), Mensesneg (1.944 pemberitaan), dan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat (312 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Presiden RI (132 pemberitaan), Mensesneg (83 pemberitaan), dan Staf Khusus Mensesneg, Faldo Madini (31 pemberitaan). —————

4. Ekspos produk perundang-undangan. Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media antara lain: —————

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (135 berita); dan

b. Aturan turunan berkaitan dengan UU IKN, termasuk peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), keputusan presiden (keppres), dan peraturan kepala Otorita IKN sebagai peraturan pelaksana. (51 berita).

Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode April 2022



1. **Ekspos dan isu pemberitaan.** Frekuensi pemberitaan mengenai Kemensetneg mencapai 3.291 artikel (media *online*), 131 artikel (media cetak) dan 1 tayangan (media TV). Tiga isu utama pemberitaan di masing-masing media, yaitu sebagai berikut: _____

a. Di media *online*, isu yang mendominasi yaitu mengenai pro-kontra penundaan Pemilu 2024 (31%); penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng (16%); dan kunjungan kerja Presiden ke Jawa Timur (12%).

b. Di media cetak, isu yang mendominasi yaitu pro-kontra penundaan Pemilu 2024 (47%); penyaluran BLT minyak goreng (14%); dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) (10%).

c. Di media televisi, isu yang muncul berkaitan dengan wacana masa jabatan Presiden tiga periode.

- 2. Sentimen pemberitaan.** Sentimen pemberitaan mengenai Kemensetneg cenderung Positif di media *online* (51%) dan Netral di media cetak (41%). Hal ini didorong oleh narasi dalam isu kunjungan PM Jepang, Kishida Fumio ke Indonesia, juga terkait narasi isu penyaluran BLT minyak goreng.
- 3. Top person.** Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden RI (2.387 pemberitaan), Mensesneg (1.926 pemberitaan), dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD (544 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Presiden RI (91 pemberitaan), Mensesneg (64 pemberitaan), dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung (27 pemberitaan)
- 4. Ekspos produk perundang-undangan.** Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) (90 berita); dan

b. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan (TPKS) (7 berita); dan

c. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (5 berita).

Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Mei 2022



1. Ekspos dan isu pemberitaan. Frekuensi pemberitaan mengenai Kemensetneg mencapai 2.908 artikel (media *online*), 113 artikel (media cetak) dan 1 tayangan (media TV). Tiga isu utama pemberitaan di masing-masing media, yaitu sebagai berikut:

a. Di media *online*, isu yang mendominasi yaitu mengenai kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat (AS) (45%); pernikahan adik Presiden Joko Widodo (15%); dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru (15%).

b. Di media cetak, isu yang mendominasi yaitu pembangunan IKN (29%); kunjungan kerja Presiden RI ke AS (25%); dan arahan Presiden tentang Pemilu 2024 (16%).

c. Di media televisi, isu yang muncul berkaitan dengan pembahasan rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 2. Sentimen pemberitaan.** Sentimen pemberitaan mengenai Kemensetneg cenderung Netral di media *online* (58%) dan di media cetak (41%). Hal ini didorong oleh narasi dalam isu kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat dan arahan Presiden Jokowi terkait Pemilu 2024. —
- 3. Top person.** Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden RI (2.210 pemberitaan), Mensesneg (2.046 pemberitaan), dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (911 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Menteri Dalam Negeri (74 pemberitaan), Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono (61 pemberitaan), dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia (15 pemberitaan). —
- 4. Ekspos produk perundang-undangan.** Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media antara lain: —

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (34 berita); dan

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) (13 berita);

Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Juni 2022



1. Ekspos dan isu pemberitaan. Frekuensi pemberitaan mengenai Kemensetneg mencapai 3.901 artikel (media *online*), 156 artikel (media cetak) dan 3 tayangan (media TV). Tiga isu utama pemberitaan di masing-masing media, yaitu sebagai berikut: _____

a. Di media online, isu yang mendominasi yaitu mengenai perombakan (reshuffle) kabinet (32%); pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (27%); dan wafatnya Emmeril Kahn, putra Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (11%).

b. Di media cetak, isu yang mendominasi yaitu reshuffle kabinet (35%); dinamika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 (16%); dan wafatnya Emmeril Kahn (13%).

c. Di media televisi, isu yang muncul berkaitan dengan reshuffle kabinet (80%) dan hubungan Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri (20%).

- 2. Sentimen pemberitaan.** Sentimen pemberitaan mengenai Kemensetneg cenderung Positif, di media *online* (45%) dan Netral di media cetak (55%). Sentimen positif didorong oleh isu agenda kepresidenan dan bimbingan teknis keprotokolan yang diadakan oleh TVRI. Sementara sentimen netral didorong oleh isu *reshuffle* kabinet dan wafatnya Emmeril Kahn. —————
- 3. Top person.** Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden RI (3.161 pemberitaan), Mensesneg (2.931 pemberitaan), dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadahlia (1.284 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Presiden RI (127 pemberitaan), Mensesneg (109 pemberitaan), dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir (28 pemberitaan). —————
- 4. Ekspos produk perundang-undangan.** Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media antara lain: —————
- a. Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (37 berita);
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (28 berita);
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (13 berita); dan
 - d. Keppres Nomor 64B/2022 tentang Pengangkatan Menteri Negara Periode 2019-2024 (5 berita).

Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Juli 2022



1. Ekspos dan isu pemberitaan. Frekuensi pemberitaan mengenai Kemensetneg mencapai 5.846 artikel (media *online*), 189 artikel (media cetak) dan 3 tayangan (media TV). Tiga isu utama pemberitaan di masing-masing media, yaitu sebagai berikut: _____

a. Di media *online*, isu yang mendominasi yaitu mengenai kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Asia Timur (35%); wafatnya Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo (17%); dan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Sumatera Utara (13%).

b. Di media cetak, isu yang mendominasi yaitu wafatnya Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo (34%); kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Asia Timur (28%); dan mundurnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli (15%).

c. Di media televisi, isu yang muncul berkaitan dengan revitalisasi Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII) (67%) dan penunjukan pengganti Menteri PAN-RB (33%).

2. Sentimen pemberitaan. Sentimen pemberitaan mengenai Kemensetneg cenderung Netral, di media *online* (48%) dan media cetak (50%). Sentimen netral didorong oleh isu agenda kepresidenan, renovasi Anjungan di TMII, dan rencana vaksinasi dosis ke-empat. _____

3. Top person. Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden RI (4.638 pemberitaan), Mensesneg (3.906 pemberitaan), dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi (1.523 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Presiden RI (144 pemberitaan), Mensesneg (103 pemberitaan), dan Mantan Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo (52 pemberitaan). _____

4. Ekspos produk perundang-undangan. Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media antara lain: _____

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (100 berita);

b. Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri PAN dan RB Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 (28 berita); dan

c. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Agustus 2022



1. **Ekspos dan isu pemberitaan.** Frekuensi pemberitaan mengenai Kemensetneg mencapai 3.474 artikel (media *online*), 111 artikel (media cetak) dan 4 tayangan (media TV). Tiga isu utama pemberitaan di masing-masing media, yaitu sebagai berikut: _____

a. Di media *online*, isu yang mendominasi yaitu mengenai peringatan HUT Kemerdekaan ke-77 RI (54%); Presidensi G20 (9%); dan revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) (8%).

b. Di media cetak, isu yang mendominasi yaitu peringatan HUT Kemerdekaan ke-77 RI (49%); kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Jawa Timur (18%); dan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (10%).

c. Di media televisi, isu yang muncul berkaitan dengan peringatan HUT Kemerdekaan ke-77 RI.

- 2. Sentimen pemberitaan.** Sentimen pemberitaan mengenai Kemensetneg cenderung Netral, di media *online* (45%) dan media cetak (45%). Sentimen netral dan positif didorong oleh isu rangkaian peringatan HUT RI, perkembangan revitalisasi TMII, pemberian tunjangan kinerja untuk Kepala BRIN, serta naturalisasi dua pemain sepak bola Indonesia. _____
- 3. Top person.** Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden RI (1.655 pemberitaan), Mensesneg (1.340 pemberitaan), dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (449 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Presiden RI (52 pemberitaan), Mensesneg (41 pemberitaan), dan Menteri PUPR (20 pemberitaan). _____
- 4. Ekspos produk perundang-undangan.** Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media antara lain: _____

a. Keputusan Presiden RI Nomor 94/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemensetneg (14 berita);

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (3 berita);

c. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 64, 65, dan 66/TK Tahun 2022 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Pratama, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma.

Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode September 2022



1. **Ekspos dan isu pemberitaan.** Frekuensi pemberitaan mengenai Kemensetneg mencapai 2.519 artikel (media *online*), 116 artikel (media cetak) dan 1 tayangan (media TV). Tiga isu utama pemberitaan di masing-masing media, yaitu sebagai berikut: _____

a. Di media *online*, isu yang mendominasi yaitu mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi (32%); kasus kebocoran data (22%); dan pelantikan Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) (13%).

b. Di media cetak, isu yang mendominasi yaitu mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi (29%), pelantikan Menteri PANRB (20%); dan kasus kebocoran data (19%).

c. Di media televisi, isu yang muncul berkaitan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

- 2. Sentimen pemberitaan.** Sentimen pemberitaan mengenai Kemensetneg cenderung Netral, di media *online* (39%) dan media cetak (48%). Sentimen netral dan positif didorong oleh pemberitaan mengenai rangkaian agenda kepresidenan, revitalisasi Tamna Mini Indonesia Indah (TMII), serta pengajuan dua nama pengganti calon Wakil Ketua KPK. _____
- 3. Top person.** Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden RI (2.006 pemberitaan), Mensesneg (1.403 pemberitaan), dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (323 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Presiden RI (88 pemberitaan), Mensesneg (68 pemberitaan), dan Menteri BUMN (20 pemberitaan). _____
- 4. Ekspos produk perundang-undangan.** Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media antara lain: _____

a. Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 71/P/2022 berisi pemberhentian Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua merangkap anggota/pimpinan KPK;

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Oktober 2022



1. Ekspos dan isu pemberitaan. Frekuensi pemberitaan mengenai Kemensetneg mencapai 2.776 artikel (media *online*), 101 artikel (media cetak) dan 3 tayangan (media TV). Tiga isu utama pemberitaan di masing-masing media, yaitu sebagai berikut: _____

a. Di media *online*, isu yang mendominasi yaitu mengenai penetapan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta (26%); persiapan penyelenggaraan KTT G20 (25%); dan tragedi Kanjuruhan (9%).

b. Di media cetak, isu yang mendominasi yaitu mengenai persiapan penyelenggaraan KTT G20 (42%), penetapan Pj. Gubernur DKI Jakarta (30%); dan tragedi Kanjuruhan (7%).

c. Di media televisi, isu yang muncul berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan KTT G20 (67%), dan penetapan Pj. Gubernur DKI Jakarta (33%).

- 2. Sentimen pemberitaan.** Sentimen pemberitaan mengenai Kemensetneg cenderung Netral, di media *online* (50%) dan Positif di media cetak (46%). Sentimen netral dan positif didorong oleh isu rangkaian agenda kepresidenan, persiapan KTT G20 di Bali, dan peluncuran platform digital Jagat Nusantara.

- 3. Top person.** Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden RI (1.966 pemberitaan), Mensesneg (1.504 pemberitaan), dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (424 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Mensesneg Pratikno (59 pemberitaan), Presiden RI (57 pemberitaan), dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (19 pemberitaan).

- 4. Ekspos produk perundang-undangan.** Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media antara lain:

- a. Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 71/P/2022 berisi pemberhentian Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua merangkap anggota/pimpinan KPK;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode November 2022



1. Ekspos dan isu pemberitaan. Frekuensi pemberitaan mengenai Kemensetneg mencapai 6.152 artikel (media *online*), 279 artikel (media cetak) dan 8 tayangan (media TV). Tiga isu utama pemberitaan di masing-masing media, yaitu sebagai berikut:

a. Di media *online*, isu yang mendominasi yaitu mengenai kandidat Calon Panglima TNI (38%); penyelenggaraan KTT G20 (36%); dan persiapan pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep (5%).

b. Di media cetak, isu yang mendominasi yaitu mengenai kandidat Calon Panglima TNI (42%); penyelenggaraan KTT G20 (31%); dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (6%).

c. Di media televisi, isu yang muncul berkaitan dengan pengiriman surat presiden (Surpres) tentang pergantian Panglima TNI (62%); penyelenggaraan KTT G20 (25%), dan pemberian Gelar Pahlawan Nasional (13%).

2. **Sentimen pemberitaan.** Sentimen pemberitaan mengenai Kemensetneg cenderung Netral, di media *online* (46%) dan di media cetak (58%). Sentimen netral terutama didorong oleh agenda kepresidenan, penunjukan KSAL Yugo Margono sebagai calon Panglima TNI. —————

3. **Top person.** Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden RI (4.643 pemberitaan), Mensesneg (4.624 pemberitaan), dan Panglima TNI, Andika Perkasa (2.079 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Presiden RI (202 pemberitaan), Mensesneg (189 pemberitaan), dan Panglima TNI (116 pemberitaan). —————

4. **Ekspos produk perundang-undangan.** Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media antara lain: —————

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 114/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

b. Keppres Nomor 48/M/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan;

c. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pemantauan Pemberitaan Media *Online*, Cetak, dan Elektronik Periode Desember 2022



1. Ekspos dan isu pemberitaan. Frekuensi pemberitaan mengenai Kemensetneg mencapai 4.312 artikel (media *online*), 189 artikel (media cetak) dan 4 tayangan (media TV). Tiga isu utama pemberitaan di masing-masing media, yaitu sebagai berikut: _____

a. Di media *online*, isu yang mendominasi yaitu mengenai pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep (44%); kunjungan kerja Presiden RI (12%); dan agenda Presiden menerima kunjungagn Sekjen ASEAN (12%).

b. Di media cetak, isu yang mendominasi yaitu mengenai pernikahan Kaesang Pangarep (25%); pengangkatan Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono (17%); dan kunjungan kerja Presiden RI (13%);

c. Di media televisi, isu yang muncul berkaitan dengan pernikahan Kaesang Pangarep (50%); Dies Natalis UGM (25%), dan kontribusi BWRI terhadap pembangunan negara (25%).

- 2. Sentimen pemberitaan.** Sentimen pemberitaan mengenai Kemensetneg cenderung Netral, di media *online* (59%) dan di media cetak (57%). Sentimen netral terutama didorong oleh berita tentang pernikahan Kaesang Pangarep, agenda kepresidenan, dan pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. —————
- 3. Top person.** Dalam lingkup *top person* di media *online*, figur teratas diduduki oleh Presiden RI (3.521 pemberitaan), Mensesneg (3.244 pemberitaan), dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (1.751 pemberitaan). Sementara itu, di media cetak, *top person* secara berurutan yaitu Presiden RI (137 pemberitaan), Mensesneg (99 pemberitaan), dan Menteri PUPR (39 pemberitaan). —————
- 4. Ekspos produk perundang-undangan.** Produk perundang-undangan yang muncul dalam pemberitaan media antara lain: —————
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 100/TNI/Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut;
 - b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
 - c. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.





Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara

Copyright @2022
